

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 36

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2009**

BUPATI CIANJUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan, sehingga perlu dijamin kelancaraan pengadaan, penyaluran serta pemanfaatannya dengan prinsip "Enam Tepat", yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008, perlu diatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4979);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Perikanan di Jawa Barat Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 tanggal 22-23 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cianjur.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur.
8. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
10. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
11. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
12. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
13. Pupuk berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
14. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan makanan tenak.
16. Sektor perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya ikan atau udang.
17. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Barat atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
18. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
19. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
20. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
21. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
22. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik : Urea, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.
23. Penyalur Lini III atau distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
24. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan distributor atau antara distributor dengan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Penyalur Lini IV atau pengecer resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.

26. Kelompok tani adalah kumpulan petani (pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang) yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.
27. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis serta alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
28. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
29. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
30. Wilayah tanggungjawab produsen, distributor dan pengecer resmi adalah propinsi dan/atau kabupaten/kota termasuk kecamatan dan/atau desa yang menjadi tanggungjawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
31. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik jenis Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
32. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
33. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibu Kota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
34. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
35. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer resmi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
36. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi intansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

37. Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, di tingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pertanian, di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari :
 - a. Pupuk an-organik, meliputi Urea, Superphos, ZA dan NPK;
 - b. Pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan petani ikan/udang yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan/udang seluas-luasnya 1 hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi bagi kecamatan dan/atau desa dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Camat/Mantan/KCD/PPL dan/atau Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan/udang yang dituangkan dalam RDKK (RKPB) yang disetujui Petugas Teknis Lapangan atau Kepala Cabang Dinas setempat.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan kecamatan/desa, jenis, jumlah dan sebaran bulan, tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK (RKPB) sesuai luas areal usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sambil menunggu penetapan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (3) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya, sepanjang tidak melampaui alokasi untuk 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV dilakukan berdasarkan RDKK (RKPB) sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Produsen, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip "Enam Tepat", yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET, serta sasaran peruntukannya di Lini IV.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajibannya masing-masing, yaitu :
 - a. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini III sampai IV di wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di Lini IV wilayah tanggungjawabnya.
- (5) Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan laporan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya masing-masing kepada KP3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

Dalam hal penetapan wilayah, distributor dan pengecer resmi

- a. Distributor bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura menetapkan wilayah tanggungjawab masing-masing pengecer resmi yang dicantumkan dalam SPJB/Kontrak;
- b. Pengecer resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip "Enam Tepat" berdasarkan RDKK (RKPB) yang sudah diajukan, dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 7

Dalam hal wilayah kecamatan/desa secara ekonomi sulit dijangkau, distributor wajib mengawasi dan mengendalikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV atau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|------|-----------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp | 1.200,00 per kg |
| b. Pupuk ZA | = Rp | 1.050,00 per kg |
| c. Pupuk Superphos | = Rp | 1.550,00 per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = Rp | 1.750,00 per kg |
| e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = Rp | 1.586,00 per kg |
| f. Pupuk Organik | = Rp | 500,00 per kg |
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Lini IV secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

KP3 Kabupaten

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi, dibentuk KP3 Kabupaten yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penyaluran, pendayagunaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh petani/kelompok tani sesuai dengan prinsip "Enam Tepat".
- (3) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah daerah dan melaporkannya kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggungjawab wilayah.

- (4) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Distributor wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengecer resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip "Enam Tepat" di wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Bupati bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah daerah.
- (3) Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok dilakukan oleh KP3 bersama PPL dan THL-TBPP serta POPT dan TB-POPT) serta Ketua Gabungan Kelompok Tani.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan pengecer resmi, dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan serta KP3 Kabupaten.
- (5) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 11

Evaluasi terhadap pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilakukan oleh KP3 dan/atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Bupati, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan KP3 Kabupaten.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan tembusan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah daerah kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh KP3 Kabupaten dan/atau Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009.

Pasal 16

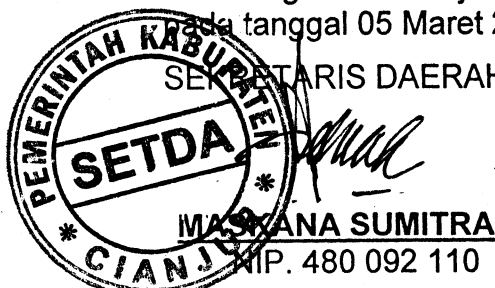
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKAMAN TAHUN 2009**

| NO. | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cianjur | 50 | 47 | 69 | 79 | 65 | 60 | 43 | 41 | 55 | 74 | 58 | 79 | 720 |
| 2 | Cilaku | 75 | 73 | 102 | 177 | 151 | 141 | 93 | 92 | 131 | 163 | 114 | 166 | 1.478 |
| 3 | Warungkondang | 116 | 119 | 137 | 95 | 80 | 74 | 51 | 49 | 100 | 129 | 95 | 134 | 1.179 |
| 4 | Cibeber | 158 | 181 | 189 | 334 | 288 | 267 | 177 | 178 | 299 | 209 | 172 | 209 | 2.661 |
| 5 | Ciranjang | 94 | 87 | 127 | 142 | 123 | 114 | 76 | 73 | 101 | 121 | 86 | 122 | 1.266 |
| 6 | Sukaluyu | 36 | 37 | 44 | 184 | 160 | 148 | 98 | 95 | 131 | 177 | 124 | 179 | 1.413 |
| 7 | Bojongsicung | 154 | 112 | 173 | 209 | 181 | 168 | 111 | 110 | 147 | 208 | 177 | 201 | 1.951 |
| 8 | Karangtengah | 102 | 96 | 135 | 200 | 172 | 159 | 106 | 103 | 143 | 201 | 139 | 205 | 1.761 |
| 9 | M a n d e | 269 | 256 | 298 | 154 | 130 | 120 | 76 | 97 | 225 | 216 | 197 | 222 | 2.260 |
| 10 | P a c e t | 155 | 142 | 210 | 80 | 30 | 18 | 52 | 20 | 34 | 40 | 106 | 102 | 989 |
| 11 | Sukaresmi | 173 | 115 | 151 | 147 | 122 | 112 | 79 | 74 | 118 | 236 | 222 | 230 | 1.779 |
| 12 | Cugenang | 226 | 209 | 284 | 201 | 142 | 124 | 114 | 90 | 149 | 184 | 214 | 231 | 2.168 |
| 13 | Cikalongkulon | 180 | 135 | 150 | 127 | 107 | 98 | 67 | 68 | 137 | 221 | 216 | 211 | 1.717 |
| 14 | Sukanagara | 293 | 309 | 265 | 74 | 44 | 36 | 44 | 37 | 234 | 149 | 200 | 152 | 1.837 |
| 15 | Takokak | 584 | 536 | 550 | 177 | 130 | 115 | 99 | 90 | 359 | 333 | 314 | 340 | 3.627 |
| 16 | Campaka | 175 | 190 | 195 | 103 | 79 | 71 | 56 | 54 | 163 | 145 | 148 | 148 | 1.527 |
| 17 | Pagelaran | 215 | 215 | 255 | 213 | 184 | 171 | 113 | 114 | 224 | 233 | 179 | 225 | 2.341 |
| 18 | Tangeung | 114 | 114 | 140 | 140 | 116 | 113 | 75 | 69 | 120 | 151 | 117 | 151 | 1.420 |
| 19 | Kadupandak | 220 | 189 | 204 | 236 | 204 | 189 | 126 | 125 | 245 | 232 | 184 | 222 | 2.376 |
| 20 | Sindangbarang | 147 | 148 | 186 | 57 | 36 | 33 | 40 | 31 | 119 | 189 | 342 | 199 | 1.527 |
| 21 | Agrabinta | 148 | 156 | 144 | 30 | 20 | 18 | 22 | 18 | 130 | 120 | 141 | 133 | 1.080 |
| 22 | Cibinong | 166 | 170 | 197 | 107 | 90 | 83 | 58 | 60 | 153 | 244 | 272 | 223 | 1.823 |
| 23 | Cidaun | 232 | 239 | 271 | 129 | 99 | 91 | 80 | 68 | 205 | 332 | 477 | 326 | 5.249 |
| 24 | Naringgul | 105 | 98 | 138 | 63 | 49 | 45 | 39 | 32 | 70 | 164 | 228 | 165 | 1.196 |
| 25 | Campakamulya | 84 | 79 | 109 | 52 | 41 | 37 | 28 | 25 | 46 | 83 | 78 | 86 | 748 |
| 26 | Cikadu | 97 | 95 | 124 | 64 | 53 | 49 | 34 | 34 | 66 | 78 | 61 | 81 | 836 |

JENIS PUPUK : UREA

DALAM TON

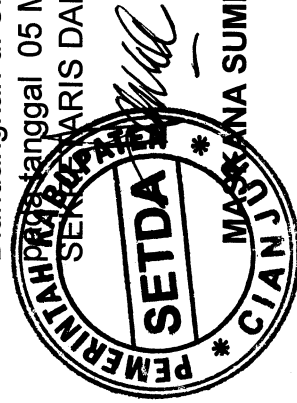
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 27 | Cipanas | 43 | 39 | 58 | 20 | 9 | 6 | 13 | 6 | 8 | 10 | 25 | 24 | 261 |
| 28 | Gekbrong | 77 | 69 | 100 | 81 | 69 | 64 | 44 | 41 | 62 | 27 | 23 | 28 | 685 |
| 29 | Cijati | 80 | 54 | 71 | 27 | 23 | 21 | 15 | 15 | 35 | 122 | 101 | 122 | 686 |
| 30 | Leles | 134 | 150 | 124 | 22 | 19 | 18 | 13 | 16 | 120 | 100 | 90 | 91 | 897 |
| 31 | Haurwangi | 84 | 65 | 99 | 117 | 102 | 94 | 62 | 61 | 83 | 112 | 92 | 110 | 1.081 |
| 32 | Pasirkuda | 78 | 76 | 92 | 86 | 77 | 65 | 46 | 49 | 84 | 92 | 76 | 91 | 911 |
| | Jumlah | 4.864 | 4.600 | 5.391 | 3.927 | 3.195 | 2.922 | 2.150 | 2.035 | 4.295 | 5.095 | 5.064 | 5.208 | 48.750 |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 36

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKAMAN TAHUN 2009

| NO. | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | DALAM TON |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cianjur | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 35 |
| 2 | Cilaku | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 51 |
| 3 | Warungkondang | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 15 | 90 |
| 4 | Cibeber | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | 14 | 22 | 141 |
| 5 | Ciranjang | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 39 |
| 6 | Sukaluyu | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 49 |
| 7 | Bojongpicung | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 48 |
| 8 | Karangtengah | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 101 |
| 9 | M a n d e | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 | 21 | 20 | 16 | 25 | 159 |
| 10 | P a c e t | 54 | 49 | 44 | 19 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 12 | 90 | 61 | 363 |
| 11 | Sukaresmi | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 17 | 100 |
| 12 | Cugenang | 47 | 43 | 39 | 20 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 | 80 | 59 | 346 |
| 13 | Cikalongkulon | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | 19 | 114 |
| 14 | Sukanagara | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 15 | 14 | 12 | 44 | 38 | 46 | 64 | 391 |
| 15 | Takokak | 52 | 47 | 40 | 34 | 31 | 15 | 11 | 8 | 53 | 52 | 65 | 85 | 493 |
| 16 | Campaka | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 22 | 21 | 27 | 32 | 205 |
| 17 | Pagelaran | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | 19 | 11 | 19 | 129 |
| 18 | Tangeung | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 11 | 71 |
| 19 | Kadupandak | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 7 | 22 | 21 | 11 | 21 | 143 |
| 20 | Sindangbarang | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 11 | 74 |
| 21 | Agrabinta | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | 6 | 18 | 111 |
| 22 | Cibinong | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 10 | 18 | 115 |
| 23 | Cidaun | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 12 | 21 | 137 |
| 24 | Naringgul | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 40 |
| 25 | Campakamulya | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 11 | 64 |
| 26 | Cikadu | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 52 |
| 27 | Cipanas | 12 | 11 | 10 | 4 | 1 | | 2 | | 2 | 3 | 20 | 13 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 28 | Gekbrong | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 |
| 29 | Cijati | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 32 |
| 30 | Leles | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 4 | 18 | 113 |
| 31 | Haurwangi | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 29 |
| 32 | Pasirkuda | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| | Jumlah | 384 | 346 | 307 | 270 | 230 | 154 | 130 | 120 | 405 | 423 | 577 | 654 | 4.000 |

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 05 Maret 2009
 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
 tanggal 05 Maret 2009
 SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 36

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKAMAN TAHUN 2009**

| NO. | KECAMATAN | BULAN | | | | | | | | | | | | DALAM TON |
|-----|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cianjur | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | 11 | 15 | 113 |
| 2 | Ciliku | 13 | 12 | 13 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14 | 27 | 34 | 26 | 218 |
| 3 | Warungkondang | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4 | 19 | 22 | 17 | 23 | 169 |
| 4 | Cibeber | 23 | 25 | 22 | 41 | 38 | 24 | 18 | 18 | 58 | 37 | 35 | 38 | 377 |
| 5 | Ciranjang | 17 | 16 | 13 | 16 | 15 | 10 | 7 | 6 | 22 | 20 | 17 | 20 | 179 |
| 6 | Sukaluyu | 6 | 6 | 5 | 26 | 24 | 16 | 12 | 10 | 34 | 30 | 24 | 29 | 222 |
| 7 | Bojongpicung | 28 | 20 | 19 | 18 | 26 | 18 | 13 | 12 | 35 | 32 | 39 | 34 | 304 |
| 8 | Karangtengah | 18 | 19 | 16 | 22 | 20 | 14 | 10 | 10 | 29 | 35 | 30 | 34 | 257 |
| 9 | Mande | 35 | 40 | 40 | 22 | 20 | 14 | 9 | 13 | 44 | 46 | 42 | 45 | 370 |
| 10 | Pacet | 36 | 34 | 29 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 20 | 21 | 181 |
| 11 | Sukaresmi | 32 | 19 | 17 | 17 | 15 | 10 | 8 | 7 | 22 | 35 | 50 | 41 | 273 |
| 12 | Cugenang | 47 | 43 | 38 | 25 | 18 | 12 | 12 | 9 | 29 | 32 | 44 | 43 | 352 |
| 13 | Cikalongkulon | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 25 | 35 | 50 | 40 | 264 |
| 14 | Sukanagara | 38 | 33 | 28 | 19 | 14 | 10 | 10 | 8 | 32 | 28 | 46 | 39 | 305 |
| 15 | Takokak | 87 | 66 | 57 | 33 | 27 | 18 | 17 | 15 | 52 | 61 | 68 | 71 | 572 |
| 16 | Campaka | 25 | 24 | 22 | 16 | 14 | 9 | 8 | 8 | 26 | 27 | 33 | 32 | 244 |
| 17 | Pagelaran | 29 | 27 | 24 | 24 | 24 | 16 | 11 | 12 | 38 | 40 | 39 | 41 | 325 |
| 18 | Tangeung | 21 | 20 | 17 | 22 | 20 | 12 | 9 | 10 | 27 | 25 | 27 | 27 | 237 |
| 19 | Kadupandak | 32 | 22 | 20 | 30 | 28 | 19 | 14 | 14 | 42 | 39 | 41 | 42 | 343 |
| 20 | Sindangbarang | 35 | 34 | 31 | 14 | 9 | 6 | 9 | 6 | 38 | 31 | 100 | 54 | 367 |
| 21 | Agrabinta | 23 | 21 | 18 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 26 | 27 | 41 | 34 | 220 |
| 22 | Cibinong | 27 | 25 | 24 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 28 | 37 | 68 | 48 | 313 |
| 23 | Cidaun | 45 | 44 | 38 | 24 | 19 | 13 | 14 | 12 | 52 | 53 | 132 | 80 | 525 |
| 24 | Naringgul | 23 | 22 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 25 | 63 | 38 | 237 |
| 25 | Campakamulya | 14 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 113 |
| 26 | Cikadu | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 18 | 14 | 13 | 15 | 150 |
| 27 | Cipanas | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 46 |

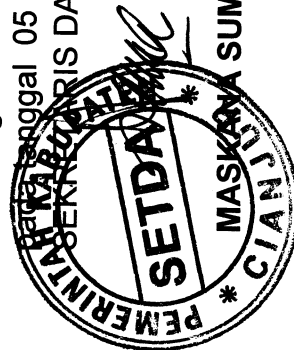
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 28 | Gekbrong | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 94 |
| 29 | Cijati | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 | 23 | 22 | 117 |
| 30 | Leles | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 19 | 20 | 22 | 22 | 156 |
| 31 | Haurwangi | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 9 | 7 | 6 | 19 | 17 | 20 | 19 | 164 |
| 32 | Pasirkuda | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 143 |
| | Jumlah | 795 | 715 | 636 | 556 | 477 | 318 | 272 | 245 | 834 | 875 | 1.192 | 1.035 | 7.950 |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
PEMERINTAH KABUPATEN CISURABAYA
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 36

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKAMAN TAHUN 2009**

| NO. | KECAMATAN | DALAM TON | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | | BULAN | | | | | | | | | | | | |
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cianjur | 19 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 11 | 13 | 25 | 27 | 23 | 24 | 245 |
| 2 | Ciliku | 29 | 29 | 33 | 35 | 44 | 40 | 27 | 28 | 57 | 59 | 49 | 55 | 501 |
| 3 | Warungkondang | 39 | 35 | 43 | 26 | 22 | 20 | 14 | 15 | 29 | 46 | 39 | 44 | 375 |
| 4 | Cibeber | 35 | 34 | 40 | 92 | 79 | 72 | 50 | 49 | 104 | 57 | 50 | 55 | 717 |
| 5 | Ciranjang | 43 | 42 | 49 | 41 | 35 | 32 | 22 | 22 | 46 | 43 | 36 | 41 | 452 |
| 6 | Sukaluyu | 11 | 11 | 13 | 51 | 43 | 40 | 27 | 27 | 57 | 65 | 53 | 61 | 459 |
| 7 | Bojongpicung | 61 | 54 | 64 | 58 | 50 | 46 | 31 | 31 | 65 | 60 | 57 | 59 | 636 |
| 8 | Karangtengah | 43 | 41 | 49 | 58 | 50 | 45 | 31 | 31 | 65 | 74 | 60 | 70 | 617 |
| 9 | Mande | 34 | 34 | 40 | 32 | 26 | 24 | 17 | 17 | 35 | 35 | 32 | 35 | 361 |
| 10 | Pacet | 57 | 59 | 66 | 18 | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | 13 | 26 | 27 | 307 |
| 11 | Sukaresmi | 55 | 44 | 52 | 41 | 34 | 31 | 22 | 22 | 45 | 65 | 66 | 66 | 543 |
| 12 | Cugenang | 74 | 72 | 83 | 52 | 38 | 33 | 30 | 24 | 52 | 52 | 59 | 63 | 632 |
| 13 | Cikalongkulon | 32 | 31 | 37 | 34 | 28 | 26 | 18 | 18 | 37 | 52 | 56 | 54 | 423 |
| 14 | Sukanagara | 38 | 34 | 39 | 16 | 10 | 8 | 10 | 6 | 14 | 18 | 36 | 29 | 258 |
| 15 | Takokak | 136 | 120 | 141 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 46 | 89 | 91 | 95 | 871 |
| 16 | Campaka | 34 | 33 | 39 | 26 | 20 | 18 | 15 | 13 | 28 | 33 | 36 | 36 | 331 |
| 17 | Pagelaran | 67 | 66 | 77 | 61 | 53 | 48 | 33 | 33 | 70 | 73 | 64 | 71 | 716 |
| 18 | Tanggeung | 40 | 39 | 44 | 38 | 32 | 29 | 21 | 20 | 42 | 48 | 44 | 45 | 442 |
| 19 | Kadupandak | 57 | 49 | 58 | 69 | 59 | 54 | 37 | 37 | 78 | 73 | 65 | 70 | 706 |
| 20 | Sindangbarang | 27 | 26 | 31 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 18 | 36 | 23 | 201 |
| 21 | Agrabinta | 19 | 17 | 21 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 37 | 30 | 35 | 188 |
| 22 | Cibinong | 41 | 40 | 47 | 29 | 24 | 22 | 16 | 15 | 32 | 46 | 58 | 50 | 420 |
| 23 | Cidaun | 51 | 50 | 59 | 29 | 25 | 22 | 16 | 15 | 33 | 53 | 74 | 59 | 486 |
| 24 | Naringgul | 36 | 35 | 42 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 18 | 31 | 39 | 33 | 292 |
| 25 | Campakamulya | 33 | 32 | 38 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 15 | 24 | 24 | 25 | 241 |
| 26 | Cikadu | 35 | 34 | 40 | 15 | 13 | 12 | 8 | 8 | 17 | 26 | 21 | 25 | 254 |
| 27 | Cipanas | 17 | 17 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 28 | Gekbrong | 33 | 33 | 39 | 24 | 20 | 18 | 13 | 13 | 26 | 9 | 8 | 9 | 245 |
| 29 | Cijati | 23 | 18 | 22 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 39 | 34 | 37 | 207 |
| 30 | Leles | 18 | 17 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 25 | 24 | 25 | 155 |
| 31 | Haurwangi | 35 | 31 | 37 | 33 | 28 | 26 | 17 | 17 | 37 | 34 | 31 | 33 | 359 |
| 32 | Pasirkuda | 25 | 24 | 31 | 23 | 20 | 18 | 12 | 12 | 27 | 31 | 24 | 29 | 276 |
| | Jumlah | 1.297 | 1.225 | 1.437 | 1.047 | 860 | 779 | 570 | 542 | 1.145 | 1.358 | 1.351 | 1.389 | 13.000 |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 36

**LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DAN PERIKAMAN TAHUN 2009**

| NO. | KECAMATAN | JENIS PUPUK : ORGANIK | | | | | | | | | | | | DALAM TON |
|-----|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | BULAN | | | | | | | | | | | | |
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cianjur | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 52 |
| 2 | Cilaku | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 9 | 66 |
| 3 | Warungkondang | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 64 |
| 4 | Cibeber | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 19 | 10 | 9 | 11 | 98 |
| 5 | Ciranjang | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 52 |
| 6 | Sukaluyu | - | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 12 | 8 | 9 | 64 |
| 7 | Bojongpicung | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 8 | 68 |
| 8 | Karangtengah | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | 12 | 83 |
| 9 | Mande | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 101 |
| 10 | Pacet | 36 | 46 | 40 | 27 | 10 | - | 13 | 4 | 27 | 22 | 66 | 77 | 368 |
| 11 | Sukaresmi | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 16 | 15 | 17 | 100 |
| 12 | Cugenang | 34 | 42 | 37 | 25 | 13 | 5 | 13 | 7 | 28 | 25 | 60 | 68 | 357 |
| 13 | Cikalongkulon | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 113 |
| 14 | Sukanagara | 21 | 25 | 22 | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 12 | 36 | 39 | 203 |
| 15 | Takokak | 27 | 33 | 30 | 19 | 10 | 5 | 10 | 6 | 22 | 27 | 48 | 54 | 291 |
| 16 | Campaka | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 19 | 23 | 122 |
| 17 | Pagelaran | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 12 | 13 | 10 | 12 | 89 |
| 18 | Tanggeung | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 61 |
| 19 | Kadupandak | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 9 | 10 | 80 |
| 20 | Sindangbarang | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 |
| 21 | Agrabinta | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 5 | 26 |
| 22 | Cibinong | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 53 |
| 23 | Cidaun | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 65 |
| 24 | Naringgul | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 39 |
| 25 | Campakamulya | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 56 |
| 26 | Cikadu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 43 |
| 27 | Cipanas | 9 | 12 | 10 | 6 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 16 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 28 | Gekbrong | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 38 |
| 29 | Cijati | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 23 |
| 30 | Leles | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 21 |
| 31 | Haurwangi | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 40 |
| 32 | Pasirkuda | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 43 |
| | Jumlah | 286 | 257 | 235 | 207 | 167 | 120 | 103 | 91 | 298 | 307 | 435 | 494 | 3.000 |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ftd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 05 Maret 2009
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 36